

CASE STUDY PERTEMUAN 9

Nama : Nazwa Bunga Lestari
NPM : 2213031040
Dosen Pengampu : 1. Dr.Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Meyta Pritandhari, S.Pd., M.Pd.,

Jawaban Case Study

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.

Kegagalan implementasi *Making Indonesia 4.0* terjadi karena kebijakan ini tidak berjalan sesuai landasan teori kebijakan industri yang semestinya digunakan sebagai rujukan. Berdasarkan *coordination failure theory*, kebijakan industri akan gagal jika aktor yang terlibat seperti kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, BUMN, dan lembaga pendukung tidak bergerak dalam arah yang sama. Teori ini relevan karena *Making Indonesia 4.0* sebenarnya membutuhkan dukungan simultan (misalnya: SDM, infrastruktur, teknologi, pembiayaan), tetapi koordinasinya lemah sehingga kebijakan tidak menjadi paket yang saling melengkapi.

Sementara itu, *capability theory* juga sangat relevan karena inti Industri 4.0 adalah penggunaan teknologi canggih, sedangkan banyak industri di Indonesia masih berada pada level teknologi menengah ke bawah. Artinya, kemampuan dasar industrinya belum siap untuk melompat terlalu jauh. Teori *industrial upgrading* juga menjelaskan kegagalan ini: Indonesia menetapkan lima sektor prioritas tanpa memperhitungkan tahapan natural perkembangan industri. Negara berkembang biasanya harus memperkuat sektor padat karya dan industri menengah dulu sebelum naik ke level teknologi tinggi. Karena proses ini dilewati, hasilnya pun tidak optimal. Ketiga teori ini saling menjelaskan bahwa masalah utama bukan pada konsep *Making Indonesia 4.0*, tapi pada kesiapan struktur industrinya dan kelemahan koordinasi antar-aktor kebijakan.

2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?

Pendekatan Indonesia berbeda dengan Vietnam dan Korea Selatan dalam hal fokus strategi, konsistensi, dan kekuatan kelembagaannya. Vietnam menggunakan strategi yang sangat praktis: menarik investasi asing melalui penyediaan kawasan industri siap pakai, insentif pajak jelas, dan kemudahan perizinan. Karena eksekusinya rapi, investor besar masuk dan membawa rantai pasok global yang langsung menggerakkan industri nasional. Korea Selatan berbeda lagi; mereka membangun industri melalui dukungan kuat pemerintah terhadap perusahaan domestik lewat kredit murah, riset bersama, dan perlindungan industri muda. Bedanya, kebijakan mereka berjalan konsisten selama puluhan tahun dan didukung lembaga negara yang kuat. Sementara Indonesia punya roadmap, tetapi pelaksanaannya tidak kuat, koordinasinya lemah, dan tidak ada lembaga tunggal yang memastikan semua program berjalan searah. Ini menyebabkan kebijakan Indonesia kurang efektif dibanding Vietnam atau Korea Selatan.

3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Indonesia membutuhkan kebijakan industri alternatif yang lebih realistis dan disesuaikan dengan kemampuan industrinya. Pertama, pemerintah perlu membentuk lembaga koordinasi khusus industri agar seluruh kebijakan mulai dari perizinan, infrastruktur, hingga pembiayaan betul-betul sinkron dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Setelah itu, pemerintah harus memperkuat kemampuan industri domestik melalui pelatihan teknologi, pendampingan digital, serta peningkatan skill tenaga kerja, karena tanpa kemampuan dasar yang kuat, Indonesia tidak mungkin naik ke level industri berteknologi tinggi. Indonesia juga perlu mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur lengkap agar investor merasa aman dan biaya produksi dapat ditekan. Kawasan ini idealnya punya *anchor firms* besar yang dapat menjadi pusat pembelajaran bagi supplier lokal.

Berikut merupakan instrument kebijakan yang dapat digunakan:

a. Insentif pajak berbasis kinerja.

Ini diberikan hanya kepada perusahaan yang benar-benar berkontribusi pada peningkatan ekspor, adopsi teknologi, atau peningkatan tenaga kerja. Alasan ini penting supaya insentif tidak terbuang percuma pada perusahaan yang hanya memanfaatkan pajak tetapi tidak meningkatkan kapasitas industri.

b. Pembiayaan murah untuk adopsi teknologi.

Banyak perusahaan ingin mengadopsi teknologi baru, tetapi terkendala biaya. Kredit berbunga rendah atau *soft loan* membantu mempercepat upgrade teknologi agar industri siap menuju 4.0.

c. Program peningkatan kapabilitas (SDM dan teknologi).

Rasionalnya jelas: Indonesia gagal karena industrinya belum siap. Dengan pelatihan, sertifikasi, pendampingan digital, dan kolaborasi industri kampus, kemampuan perusahaan akan meningkat dan siap bersaing.

d. Kawasan industri terintegrasi.

Kawasan industri yang lengkap dengan listrik stabil, jalan logistik, dan kemudahan izin akan mengurangi biaya produksi. Rasionalnya: semakin murah biaya produksi, semakin mudah menarik investor dan mempercepat industrialisasi.

e. Kemitraan pemerintah perguruan tinggi industri.

Kerja sama ini mendorong inovasi, riset yang relevan, serta mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan akademik. Rasionalnya: inovasi tidak muncul hanya dari pemerintah, butuh kolaborasi.

f. Monitoring & evaluasi dengan sunset clause.

Ini penting agar setiap kebijakan yang tidak efektif bisa dihentikan, sehingga anggaran negara tidak terbuang dan kebijakan dapat diarahkan ke program yang lebih tepat.